

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Undang-Undang ini menyebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah Kota maupun Kabupaten, diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Salah satu tujuan pemberian otonomi adalah untuk mempercepat laju pertumbuhan daerah dan demokrasi yang mendorong lahirnya keputusan politik.

Implikasinya adalah terbitnya Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Ada yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketiga jenis dana tersebut bersama dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dialokasikan ke daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Paat, Nangoi, & Pusung, 2019).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk mampu menciptakan sistem manajemen yang mendukung operasionalisasi pembangunan daerah. Kabupaten Kupang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Nusa Tenggara Timur yang juga ikut melaksanakan otonomi daerah dengan mengelola secara mandiri dan memanfaatkan sejumlah sumber daya yang di milikinya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah dan menjadi poin penting dalam pengembangan efektivitas dan kapabilitas daerah, serta sebagai alat dalam menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, maupun membantu dalam pengambilan keputusan, mengarahkan dan menjamin kesinambungan pembangunan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Anggaran berfungsi sebagai alat untuk memotivasi manajemen pemerintah daerah agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target kinerja. Sistem anggaran juga merupakan suatu sistem penyusunan anggaran yang menekankan pada hasil dan mengendalikan belanja. Sistem ini terutama berusaha untuk mengaitkan langsung antara (output) dengan hasil (outcome) yang disertai dengan penekanan terhadap efektivitas dan efisiensi anggaran yang dialokasikan (Laukamang, dkk, 2016). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Dalam menyusun APBD diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan (Lantu, 2017).

Efisiensi merupakan suatu perbandingan yang digunakan untuk mengukur antara output yang maksimal dengan input tertentu dengan nilai biaya yang sangat minimum. Dalam hal ini, pemerintah harus lebih mengoptimalkan penggunaan input dengan tujuan menghasilkan output tertentu untuk menghasilkan nilai biaya yang sangat minimum mungkin. Efisiensi dapat dikatakan sebagai suatu ukuran atau proses yang dapat dinilai dari penggunaan input (biaya dan sumber daya) tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari kegiatan yang dilakukan. Efisiensi merupakan ukuran pencapaian suatu output yang maksimal dengan input tertentu atau dengan penggunaan input terendah untuk mencapai output tertentu (Deddi dan Ayuningtyas, 2010).

Adapun pengukuran efisiensi yaitu dengan melakukan perbandingan antara input yang harus digunakan dengan output yang telah dihasilkan. Suatu kegiatan operasional bisa dikatakan efisien jika dalam produk atau hasil kerja telah dicapai menggunakan dana, serta sumber daya yang serendah-rendahnya. Pada teori efisiensi indikator dijadikan tolak ukur untuk menilai antara input sumber daya dalam organisasi dan output yang dihasilkan. Dapat diartikan efisiensi merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk menilai upaya dalam mengoptimalkan penggunaan (input) masukan, dengan tujuan menghasilkan (output) keluaran tertentu dengan nilai biaya yang sangat minimum, atau suatu kemampuan dalam menghasilkan keluaran (output) yang lebih besar dibandingkan jumlah masukan (input).

Efektivitas adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, sedangkan efisiensi dapat diartikan sebagai pemanfaatan input minimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Secara sederhananya efisiensi digunakan untuk melaksanakan suatu organisasi dalam mencapai sasaran atau tujuan dengan benar. Belanja adalah semua pengeluaran kas umum negara atau kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat atau daerah.

Belanja yang efektif akan mengidentifikasi keterkaitan antara nilai uang dan hasil, serta dapat menjelaskan keterkaitan yang terjadi dan pengelolaan anggaran belanja secara efektif. Jika terjadi perbedaan antara rencana dan realisasinya, dapat dilakukan evaluasi sumber-sumber input dan bagaimana keterkaitannya dengan output atau outcome untuk menentukan efektivitas pelaksanaan anggaran atau belanja (Verasvera, 2016).

Belanja daerah dapat dikatakan efektif apabila realisasi diatas atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Begitu pula, belanja daerah dapat dikatakan efisien apabila realisasi belanja daerah sama atau lebih rendah dari realisasi belanja dalam satu tahun periode, dan mampu mencapai target output yang telah ditentukan (Laukamang, dkk, 2016). Penulis melihat tingkat efektivitas dan efisiensi APBD Kabupaten Kupang yang berubah-ubah, kadang mengalami peningkatan kadang pula mengalami penurunan.

Kabupaten Kupang merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mana Ibu Kota Kabupaten terletak di Oelamasi. Kabupaten Kupang memiliki tingkat penduduk 379.3464 jiwa, dan kepadatan penduduk 68,91 per/km² (kabupaten kupang dalam angka, 2022).

Tabel 1.1

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Kupang
Tahun 2017-2021**

Tahun	Rencana Pendapatan	Realisasi Pendapatan
2017	Rp. 1.208.804.100.729,59	Rp. 1.141,043.758.854,62
2018	Rp. 1.283.332.114.446,26	Rp. 1.236,846.999.491,25
2019	Rp. 1.296.926.426.852,06	Rp. 1.266,901.145.258,64
2020	Rp. 1.187.893.025.414,77	Rp. 1.175,919.425.858,51
2021	Rp. 1.210.539.566.363,00	Rp. 1.161,477.530.683,75

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kupang,2022

Berdasarkan data Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah di Kabupaten Kupang dari tahun 2017-2021 mengalami fluktuatif.

Tabel 1.2
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Kabupaten Kupang
Tahun 2017-2021

Tahun	Rencana Belanja	Realisasi Belanja
2017	Rp. 1.308.488.834.696,00	Rp. 1.021.945.698.219,29
2018	Rp. 1.306.708.246.379,60	Rp. 1.221,688.581.122,00
2019	Rp. 1.335.121.760.746,65	Rp. 1.211,863.528921,00
2020	Rp. 1.273.644.573905,00	Rp. 1.149,587.557.091,39
2021	Rp. 1.313.366.343.020,00	Rp. 1.185,890.563.525,36

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kupang,2022

Berdasarkan data Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa Realisasi Anggaran Belanja Daerah di Kabupaten Kupang dari tahun 2017-2021 mengalami fluktuatif.

Didalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan tolak ukur serta mempermudah peneliti dalam Menyusun penelitian ini. Penelitian terdahulu dilakukan oleh John Wesly Koilam, Anderson G.Kumenaung, Debby Ch. Rotinsulu dengan judul Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2012-2018 hasil dari penelitian ini sebagai berikut: Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Utara selama tahun 2012-2018 cenderung semakin menurun, dari hasil analisis menunjukkan bahwa perhitungan dengan menggunakan formulasi tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2012-

2018 rata-rata adalah sebesar 96,63% artinya tingkat efisiensi masih kurang karena hasilnya kurang dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih belum efisien dalam menggunakan anggarannya. Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Utara selama tahun 2012-2018 cenderung stabil, dari hasil analisis menunjukkan bahwa perhitungan dengan menggunakan formulasi tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2012-2018 rata-rata adalah sebesar 91,92 per tahun. Dengan demikian berarti tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Utara adalah sudah efektif, karena dari hasil perhitungan menunjukkan angka lebih dari 90%.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Eko Santoso, (2011) dengan judul Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Ngawi, memperoleh hasil penelitian yaitu perhitungan dan formulasi tingkat efisiensi secara keseluruhan rata-rata adalah sebesar 97,53%, ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi masih rendah karena hasilnya kurang dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah masih boros dalam menggunakan anggarannya. Sedangkan hasil analisis efektivitas pengelolaan keuangan daerah menunjukkan bahwa perhitungan dari formulasi tingkat efektivitas pengelolaan keuangan Kabupaten Ngawi tahun 2005-2010 berfluktuasi dengan tingkat efektivitas rata-rata sebesar 94,03%. Dengan demikian berarti tingkat efektivitas pengelolaan keuangan Kabupaten Ngawi adalah sudah efektif, hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan yang menunjukkan angka lebih dari 90%.

Novie Manopo, Debby Ch Rotinsulu, Sri Murni (2009) dengan judul Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, memperoleh hasil penelitian yaitu perkembangan pertumbuhan penerimaan dan pengeluaran mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Di mulai pada tahun 2006 pertumbuhan penerimaan mengalami minus 18% begitu juga dengan pertumbuhan pengeluaran yang mengalami minus sebesar -17,37%. Kemudian ditahun 2007 mengalami pertumbuhan baik dari dari segi penerimaan maupun pengeluaran. Dari segi penerimaan dapat dilihat pertumbuhan yang di alami dari -18% menjadi 30,06% begitu juga dengan sisi pengeluaran meningkat dari -17,37% menjadi 24,19%. Pada tahun yang selanjutnya adalah tahun 2008, pada tahun ini penerimaan mengalami penurunan sebesar 30% menjadi 27%, tetapi dari sisi pengeluaran mengalami peningkatan dari 24,19% menjadi 30,88%. Namun pada tahun yang terakhir adalah tahun 2009, di tahun ini dari sisi penerimaan maupun pengeluaran mengalami penurunan. Dari sisi penerimaan penurunan yang terjadi mulai dari 27,29% menjadi 26,88% begitu juga yang di alami dari sisi pengeluaran penurunan pun terjadi dari 30,88% menjadi 22,52%. Sehingga dengan demikian selama periode 2005-2009 penerimaan daerah ini mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 16,56%. Dan dari sisi pengeluaran selama periode 2005-2009 total pengeluaran daerah Kabupaten Minahasa Tenggara mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 15,06%.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan APBD di Kabupaten Kupang karena penulis melihat APBD di Kabupaten Kupang berfluktuatif dari tahun 2017-2021. Berdasarkan hal tersebut penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Kupang"

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Kupang.

1.3. Persoalan Penelitian

1. Bagaimana Pengelolaan Keuangan Daerah Di kabupaten Kupang jika diukur dengan Rasio Efisiensi?
2. Bagaimana Pengelolaan Keuangan Daerah Di kabupaten Kupang jika diukur dengan Rasio Efektivitas?

1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kupang.
2. Untuk menganalisis tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kupang.

Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat bagi beberapa pihak terkait sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada kajian analisis kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Kupang didalam menentukan kebijakan yang mampu melihat Tingkat Efisiensi Dan Efektivitas Di Kabupaten Kupang dimasa yang akan datang.